

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 **28** 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

Penambangan di Hutan Harus Kantongi IPPKH

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban meminta, semua perusahaan pertambangan yang beroperasi di kawasan hutan, tapi tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) darinya menghentikan operasi.

"Mereka harus menghentikan kegiatan operasinya. Segala kerugian yang timbul akibat kegiatan pertambangan tanpa IPPKH harus diberi sanksi," kata MS Kaban di Jakarta seperti dikuti *Antara*, Rabu (27/9).

Menurut dia, perusahaan pertambangan diharuskan memiliki IPPKH dari Menhut jika ingin beroperasi di kawasan hutan. Itu telah diatur UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 14 tahun 2006 tentang IPPKH. IPPKH diterbitkan Menhut setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota dan gubernur.

Saat ini, ada perusahaan pertambangan mangan asal Australia PT Elga yang beroperasi di pulau Doi, Loloda, Halmahera Utara tidak memiliki IPPKH. Selain itu, PT Elga juga dituduh membuang limbah yang telah melebihi baku mutu analisa dampak lingkungan (Amdal) dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara (Malut) juga telah mendesak, Polda Maluku Utara segera menghentikan operasi penambangan PT Elga, karena telah banyak melakukan pelanggaran. Polda Maluku Utara telah menurunkan tim untuk menyelidiki aktivitas penambangan PT Elga dan menemukan bukti, perusahaan itu belum memiliki IPPKH. Selain itu, aktivitas perusahaan itu juga telah merusak lingkungan. (lim)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 **28** 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

Izin tambang Indotan terancam ditolak

MATARAM: Permohonan izin eksplorasi yang diajukan perusahaan tambang PT Indotan di Pulau Lombok terancam ditolak. Pasalnya, berdasarkan Perda tentang Tata Ruang, daerah ini tertutup untuk kegiatan penambangan.

Asisten II Setda Nusa Tenggara Barat A. Malik mengatakan PT Indotan telah mengadakan penelitian pendahuluan di Pulau Lombok sejak 1998. Kemudian pada 2006 ditingkatkan ke tahap eksplorasi dan perusahaan tersebut sudah mengajukan permohonan izin.

"Sampai sekarang belum ada kepastian apakah izin eksplorasi tersebut dikabulkan atau ditolak, kita akan mengonsultasikan dengan DPRD NTB dan meminta pertimbangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral," katanya, kemarin.

Dia mengatakan kalau dikaitkan dengan Perda Tata Ruang, maka kegiatan penambangan di hutan lindung di Pulau Lombok dilarang, karena kabupaten/kota di Pulau Lombok menjadi wilayah pengembangan pariwisata.

(ANTARA)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A.20

TAHUN 2006

Kapal Asing Masih Diizinkan Angkut Batu Bara

JAKARTA — Menteri Perhubungan Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tidak akan merevisi *road map* angkutan batu bara sampai 2010. Dalam *road map* itu, kapal asing masih bisa mengangkut batu bara sampai 2010.

"Awalnya ada keinginan untuk merevisi bahwa kapal asing dibatasi sampai 2008. Tapi, karena faktanya sampai 2010 kita masih kekurangan, jadi harus diterima," kata Hatta kemarin.

Keputusan itu, kata Hatta, diambil setelah disepakati Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Asosiasi Pengusaha Kapal Nasional.

● ANTON APRIANTO

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> ● BISNIS INDONESIA ○ INVESTOR DAILY ○ KOMPAS ○ KORAN TEMPO ○ MEDIA INDONESIA ○ PIKIRAN RAKYAT ○ RAKYAT MERDEKA ○ REPUBLIKA ○ SUARA KARYA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ SEPUTAR INDONESIA ○ SUARA PEMBARUAN ○ SINAR HARAPAN ○ TABLOID KONTAN ○ THE JAKARTA POST ○ MAJALAH GATRA ○ MAJALAH TEMPO ○ MAJALAH TRUST ○ 																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST <u>SEPT</u> OKT NOV DES																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	<u>28</u>	29	30	31
HALAMAN : 75																														
TAHUN 2006																														

Distamben Cilacap kaji amdal Holcim

CILACAP: Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kab. Cilacap, Jawa Tengah, akan mengkaji dan mengaudit amdal PT Holcim Indonesia menyusul adanya tuntutan masyarakat agar izin penambangan batu kapur di wilayah Pulau Nusakambangan itu ditinjau kembali.

"Dulu pada saat menyusun amdal penambangan tersebut, memang tidak ada kajian sosial menyangkut persepsi masyarakat tentang adanya bencana tsunami. Namun dampak fisik dan dampak biotik yang ditimbulkan terhadap kehidupan flora dan fauna sudah diperhitungkan," kata Kepala Distamben Cilacap Kiswoyo, kemarin.

Dia mengatakan analisis mengenai dampak lingkungan PT Holcim yang hingga saat ini dijadikan acuan tidak mempertimbangan bahwa wilayah Cilacap berada pada lempengan.

Apalagi sekarang sering terjadi gempa bumi tektonik yang berpotensi menimbulkan bencana tsunami pada daerah rawan gempa. Sehingga amdal yang diberlakukan sekarang harus diaudit agar sesuai dengan kondisi saat ini.

Menurut dia, izin penambangan yang diberikan kepada Holcim sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Kegiatan penambangan batu kapur di wilayah itu sesuai Keppres No. 38/1974 yang menyatakan bahwa Pulau Nusakambangan bisa dibuka untuk kegiatan pertambangan. (ANTARA)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 77											TAHUN 2006																			

Industri tembaga lampau kapasitas

Oleh YUSUF WALUYO JATI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Peningkatan konsumsi katoda tembaga di pasar domestik di tengah kenaikan harga di pasar internasional menyebabkan produksi di industri *smelting* tembaga mencapai kapasitas penuh. Pada 2005 lalu, utilisasi produksi tembaga nasional bahkan mencapai hingga 105%.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) Ansari Bukhari di Jakarta, mencontohkan kinerja produksi di PT Smelting Indonesia (anak perusahaan Mitsubishi Jepang)—satu-satunya produsen katoda tembaga nasional—tercatat

mencapai 261.755 ton pada 2005.

“Produksi ini melebihi kapasitas terpasang pabrik itu, yang mencapai kira-kira 250.000 ton per tahun atau 105% dari kapasitas terpasang,” papar dia, kemarin.

Untuk mencapai kapasitas sebesar itu, perusahaan terpaksa menambah sif kerja sehingga produksinya bisa melebihi dari kapasitas terpasang.

Berdasarkan data Depperin, tren peningkatan produksi sejak 2001 hingga 2005 mencapai 4,74%. Kecenderungan ini juga diperkirakan akan berlanjut pada 2006.

Ansari mengungkapkan tingginya produksi katoda tembaga dipicu oleh peningkatan

permintaan di dalam negeri, terutama dari proyek-proyek kabelisasi dan pembangunan pembangkit PLN.

Sementara itu, di luar negeri harga komoditas tembaga dunia di bursa London Metal Exchange (LME) meningkat secara signifikan dari US\$2.424 per ton pada 2004 menjadi US\$7.695 per ton pada 2005. Lonjakan harga internasional itu terlihat sejak Februari 2004.

Membaiiknya pasaran harga internasional ini juga diperkirakan Ansari sebagai pemicu produksi katoda tembaga nasional. “Kenaikan ini bersamaan dengan kenaikan harga baja. Tetapi harga tembaga malah melampaui harga baja,” kata Ansari.

Rerata kenaikan konsumsi per bulan dari 2001 hingga 2005 mencapai 18,61%, sementara tren produksi naik 4,74%. Namun, ekspor sepanjang lima tahun itu mengalami minus 9,1%, sementara impor minus 15,31%.

Menurut dia, permintaan dalam negeri pada tercatat Juni 2006 sebesar 9.700 ton, sedangkan pada bulan berikutnya yakni Juli meningkat menjadi 11.000 ton, dan Agustus tercatat sebesar 13.500 ton.

Total produksi hingga akhir 2006, diperkirakan akan mencapai 250.000 ton atau sekitar 20.000 ton per bulan. “Dari angka tersebut 60% di antaranya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” katanya.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 24											TAHUN 2006																			

PERTAMBANGAN

Ekspor Bauksit dari Bintang Ditutup jika Investor Masuk

TANJUNG PINANG, KOMPAS — Ekspor bauksit akan ditutup jika investor pengolahan bauksit berinvestasi di Bintang untuk mengolah bahan baku bauksit menjadi produk yang bernilai tambah. Saat ini investor dari China merencanakan menanam modal senilai 250 juta dollar AS bersama PT Antam.

Itu dikatakan Bupati Bintang Anser Ahmad di Tanjung Pinang, Rabu (27/9). "Ekspor bauksit akan kita tutup jika investor sudah masuk," kata Anser. Ia menambahkan, BUMN dari China, Xinfu, merencanakan membangun pabrik pengolahan bauksit (*smelter*) bersama PT Antam. Realisasi investasi itu baru dilakukan tahun 2007. Selain itu, investor dari Swedia juga pernah menjajaki kemungkinan investasi pengolahan bauksit di Bintang. "Naraun, sampai sekarang belum ada perkembangan. Baru penajakan saja, belum jelas rencana investasinya," katanya.

Dengan adanya pabrik pengolahan bauksit itu, lanjut Anser, diharapkan bahan baku bauksit dapat dimanfaatkan lebih besar di dalam negeri. Ia mengakui, selama ini hasil eksploitasi bauksit lebih banyak diekspor ke China dan beberapa negara lain.

Pemerintah daerah, lanjut Anser, memang memberikan izin penambangan bauksit kepada PT

Antam dan kuasa pertambangan yang dimiliki perorangan. Karena itu, dia merencanakan mengumpulkan pengusaha pertambangan bauksit untuk mempertimbangkan kemungkinan penutupan ekspor bauksit jika investor pengolahan bauksit sudah masuk.

Terkait dengan penambangan bauksit di Pulau Telang yang dinilai merusak lingkungan, menurut Anser, para penambang bauksit memiliki kewajiban untuk merehabilitasi tempat penambangan. Ia menambahkan, penambang bauksit umumnya hanya mengambil lapisan tanah bagian atas atau bukit sehingga tidak meninggalkan lubang-lubang besar.

Sementara itu, Ketua Harian Bintang Crisis Centre Suryadi menilai kontribusi penambangan bauksit terhadap penerimaan anggaran pendapatan daerah relatif kecil. "Sumbangan penerimaan dinas pertambangan tahun 2006 hanya Rp 10 juta," katanya.

Suryadi menambahkan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penambangan bauksit. Penambangan bauksit secara besar-besaran tidak hanya dilakukan dengan meratakan bukit, tetapi juga mengeruk lahan-lahan dengan kedalaman sampai delapan meter. (FER)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 1		
TAHUN 2006		

Aparat Kepolisian Harus Gali Info di Pemprov

JAKARTA (Suara Karya): Guna menuntaskan kasus penambangan dan pembalakan liar (*illegal mining* dan *illegal logging*) di Kalimantan Selatan (Kalsel), aparat penegak hukum di tingkat pusat harus proaktif memburu informasi dan keterangan langsung dari pejabat di Pemprov Kalsel. Sebab, penjahat lingkungan kelas kakap seperti Anton Gunadi sangat berperan di daerah tersebut sehingga dia kerap disebut "bupati bayangan" di Tanah Bumbu.

"Pemeriksaan jangan hanya berhenti pada pelaku kecil-kecil (seperti Donny Laimena). Aparat harus aktif mengejar pelaku yang berperan sebagai *master mind*. Jadi, aparat jangan hanya berani bertindak tegas terhadap supir pengangkut kayu atau penambang liar kelas teri. Ringkus dong bos besarnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf di Jakarta, Rabu kemarin.

Wakil rakyat yang membidangi masalah hukum dan kepolisian itu, mengaku kecewa dengan langkah aparat yang serba tanggung dalam menuntaskan kasus penambangan dan pembalakan liar, khususnya di Kalsel. "Ini bukan mengatasi barang selundupan seperti narkoba yang tersembunyi. Barangnya sudah jelas kok. Karena itu, mestinya pelaku bisa ditangkap dengan mudah," ucapnya.

Muzammil menilai, kasus penambangan dan pembalakan liar yang sudah ditangani aparat tidak sebanding dengan jumlah laporan masyarakat yang terus membanjiri kantor-kantor aparat hukum. "Saya juga pernah melaporkan penjahat lingkungan kelas kakap. Tapi yang penting kan penanganan dan penuntasannya," ujarnya.

Pernyataan senada juga dike-

mukakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel Berry N Furqon. Dia menuturkan, aparat di tingkat pusat harus turun tangan langsung "memburu" informasi ke Pemprov Kalsel. "Selama ini ada ketimpangan di level penegak hukum dalam menangani kasus penambangan dan pembalakan liar di Kalsel ini. Karena yang (berkomitmen) kuat hanya kepolisian (Polda Kalsel), sementara dua lembaga lain (kejaksaan dan kehakiman) di Kalsel justru sering mementahkan kasus yang sudah hampir matang," ujarnya.

Berry menambahkan, upaya menuntaskan kasus penambangan dan pembalakan liar di Kalsel seperti mengurai benang kusut. "Pelaku sudah memiliki jaringan kuat di daerah sampai ke pusat. Aparat, pejabat, pembalak, penambang, dan pengusaha punya *networking* dan banyak

modus operandi," ujar Berry.

Dia menyebut sejumlah modus seperti "cuci mangkok" dan "dokumen terbang" keterangan asal kayu yang multifungsi dan jelas-jelas ilegal. "Ini sebenarnya bisa dibuktikan kalau pemerintah punya komitmen kuat dan polisi tidak kenal kata kompromi dengan kejahatan," kata Berry.

Menurut dia, walau dalam setahun terakhir penanganan kasus penambangan dan pembalakan liar oleh kepolisian secara nasional mencatat kemajuan, *toh* cukong-cukong kakap belum juga tertangkap. Padahal kasus penambangan dan pembalakan liar di Kalsel ini bisa dikembangkan menjadi berlapis. "Aparat tidak hanya berputar pada masalah penambangan dan pembalakan liar, tapi bisa mengembangkannya menjadi kasus korupsi, manipulasi, dan sebagainya," ucapnya. (Yudhiana)

"Aparat, pejabat, pembalak, penambang, dan pengusaha punya *networking*."

Berry N Furqon
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel

60